

MULTIKULTURALISME DALAM CERITA TRADISIONAL YOGYAKARTA

Muhammad Thobroni dan Burhan Nurgiyantoro

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan

Jl. Cut Nyak Dien 4 A Ploso, Pacitan

Telp. 081 7954 0003, E-mail: galangkautsar@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur multikulturalisme dalam cerita tradisional Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana. Sumber penelitian ialah cerita tradisional Yogyakarta dalam bentuk buku yang diperoleh dengan teknik baca-catat. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis wacana dengan meminjam teknik referensi, inferensi, pengetahuan tentang dunia, dan perbandingan. Keabsahan data melalui validitas dan reliabilitas. Validitas data melalui validitas semantik dan verifikasi pakar, yakni Prof. Dr. Bakdi Soemanto, pakar sastra dan penulis cerita tradisional, serta Dr. Purwadi, pakar Kejawaan. Reliabilitas melalui reliabilitas intrarater yakni baca-kaji-ulang, dan reliabilitas interater dengan cara berdiskusi dengan teman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: cerita tradisional Yogyakarta mengandung unsur multikulturalisme bidang sosial-budaya, seperti perang saudara, ketidakadilan gender dan nafas feminisme Jawa, ketahanan pangan, teknologi berbasis masyarakat, semangat dagang, masalah keluarga, penghormatan terhadap tata susila, dan sikap tamak dalam hidup, politik dan hukum seperti perebutan kekuasaan dan kepemimpinan politik, dan pendidikan seperti pendidikan transfer nilai, pendidikan pekerti, pendidikan kearifan lokal, pendidikan ramah lingkungan, pendidikan religiusitas, pengenalan lintas budaya, pendidikan konseling remaja, penghormatan terhadap pahlawan, pendidikan enterpreunership, dan pendidikan kewarganegaraan. Keragaman dalam cerita tradisional menunjukkan cerita tradisional Yogyakarta intensif dalam pergulatan sosial-budaya. Pergulatan itu menjadi inspirasi penting bagi proses lahirnya cerita tradisional, sekaligus merekam dan memotret realitas sosial-budaya. Cerita tradisional bertema politik menunjukkan masyarakat pada dasarnya “merasa akrab” dengan peristiwa politik, meskipun terlihat “diam” atas apa yang dirasakan. Cerita tradisional menjadi “pemberontakan” karena tersumbatnya saluran berpendapat terhadap proses politik yang terjadi. Cerita tradisional bertema pendidikan menunjukkan masyarakat memiliki kepedulian dan keterikatan tertentu dalam dunia pendidikan.

Kata Kunci: *multikulturalisme, cerita tradisional.*

ABSTRACT

This study aims to describe the multicultural elements in the traditional folk tales of Yogyakarta. This study is a descriptive qualitative study which applies discourse analy-

sis method. The objects of the research are the books of traditional folk tales of Yogyakarta. The data were collected using reading and recording techniques and analyzed using discourse analysis method by adopting various techniques such as reference, inference, world view and comparison. The validity of the data was achieved through semantic validity and expert verification. The experts were Prof. Dr. Bakdi Soemanto as an expert in literature studies and Yogyakarta folk tales writer and Dr. Purwadi as an expert in Javanese culture. The reliability was achieved through intra-rater reliability by reading and reviewing, and inter-rater reliability by discussing the data with peers. The findings suggest that the traditional folk tales of Yogyakarta contain some multicultural elements of socio-culture such as civil war, gender disparity, feminism of Javanese culture, food welfare, community-based technology, spirit of trading, family problems, ethical respect, and greed; politics and laws, such as the political struggle and leadership; and education such as transfer of values, morality, local wisdom, environmental care, religious teaching, cross culture understanding, teenage counseling, heroism, entrepreneurship, and civic education. The socio-cultural variety found in the folk tales of Yogyakarta shows that the folk tales intensively interact with the socio-culture. The interaction can be an inspiration for the process of the folk tales creation. Moreover, it can also record and portray the socio-cultural phenomena. The traditional folk tales with political themes show that the society basically was “familiar” with political issues, although they seemed to be “quiet” in relation to what they actually felt. The traditional folk tales become a “rebellion” because of the blocking of the channel for idea on political issue. The traditional folk tales with educational themes show that the society basically has a relation and concern on education issue.

Key words: *multiculturalism, folktales.*

PENDAHULUAN

Minat membaca dan memahami kembali kearifan yang terkandung dalam cerita tradisional perlu didorong kembali. Hal itu mengingat cerita tradisional adalah wajah masa lalu bangsa ini. Cerita tradisional adalah penyambung lidah rakyat masa lalu dengan masa kini yang tersebar secara lisan. Merujuk penjelasan Abrams (1976, via Teeuw, 1984: 50-51), bahwa terdapat pandangan sastra merupakan cermin masyarakat, juga ada pandangan tentang sastra bertugas memberi ajaran dan kenikmatan. Sastra diharapkan dapat menggerakkan pembaca kepada kegiatan yang bertanggung jawab. Cerita tradisional dapat dianggap sebagai cermin masyarakat pada jamannya: bagaimana pemikirannya, perasaannya, dan cara mereka menyelesaikan berbagai persoalan. Selain itu, cerita tradisional dapat mengungkapkan cara masyarakat jaman dulu menghadapi pergulatan keragaman budaya di tengah kehidupan sehari-hari. Cerita tradisional sekaligus akan menghadirkan pelajaran berharga bagi generasi sekarang, tentang pentingnya kearifan bagi manusia berbudaya dalam menghadapi realitas multikultural.

Berbagai cerita tradisional yang sudah disusun dalam bentuk buku merupakan salah satu bentuk pendidikan yang penting bagi manusia. Cerita tradisional yang mengandung berbagai nilai pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan berada pada ruang lingkup kebudayaan, bukan di ruang hampa (vakum). Imam Barnadib (2002: 4) mengatakan pendidikan

pada hakikatnya adalah transfer dan transformasi nilai dan norma kebudayaan, yang kemudian menjadi miliknya dan membentuk kepribadiannya. Emansipasi yang dilakukan manusia melalui pendidikan itu lantas menjadi upaya meningkatkan manusia dari makhluk biologis instingtif menuju arah manusia yang berbudaya dan akhirnya berohani.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah wujud unsur-unsur multikultural dalam cerita tradisional Yogyakarta. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan unsur-unsur multikultural dalam cerita tradisional Yogyakarta.

Liliweri (2005: 62) menyatakan masyarakat multikultur adalah masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik sehingga melahirkan suatu masyarakat yang kita sebut masyarakat multikultur. Apa dampaknya? Kita ternyata berdiam di tengah masyarakat yang “plural” atau majemuk karena kebudayaan yang beragam. Sementara itu, setiap individu dan kelompok mempunyai kebutuhan. Jika masyarakat terdiri dari beragam kelompok, termasuk kelompok etnik dan kelompok budaya, maka setiap masyarakat mempunyai beragam kebutuhan. Dalam perkembangannya, sadar atau tidak sadar, terjadi interaksi antarkelompok etnik untuk bersama-sama atau bekerjasama berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya konsep pluralisme di tengah kehidupan masyarakat multikultural.

Pluralisme etnik merupakan pengakuan terhadap kesetaraan sosial dan budaya antara beragam kelompok etnik yang ada dalam suatu masyarakat. Ia dapat dianggap sebagai pandangan yang mengatakan bahwa semua kebudayaan manusia harus dihargai dan diperhatikan. Tidak ada satu kebudayaan atau masyarakat yang superior terhadap kebudayaan atau masyarakat yang lain; bahwa setiap kebudayaan memiliki kontribusi tertentu terhadap proses memanusiaikan orang lain. Dalam kenyataannya betapa sering kita menemukan ada kebudayaan atau seperangkat kebudayaan dari komunitas atau masyarakat tertentu yang tidak kita ketahui secara pasti. Pluralisme mengklaim bahwa dalam masyarakat tempat kita hidup bersama, tidak ada kebudayaan yang tidak setara. Karena itu, setiap kebudayaan harus diakui, dihargai secara sosial oleh penduduk yang beragam.

Zaman nenek moyang dulu, cerita tradisional beredar di masyarakat dari mulut ke mulut (*tutur tinular*). Lukens (2003: 24) menyatakan, istilah “tradisional” menegaskan bahwa cerita tradisional hadir kepada masyarakat dari sesama anggota masyarakat itu sendiri, seorang pencerita yang tidak bernama, dan keberadaannya bertumpu pada tradisi oral. Sementara Huck (1987: 254) menegaskan bahwa cerita tradisional meliputi segala narasi yang tertulis maupun terlisankan yang diwariskan secara turun-temurun dalam kurun waktu bertahun-tahun, meliputi legenda, mite, dan fabel. Saat ini cerita tradisional pun banyak dikisahkan oleh orang tua dan guru kepada anak-anak melalui lisan (*wicara*), misalnya dongeng menjelang tidur atau di kelas. Sementara itu, kini tradisi tulis semakin berkembang seiring dengan kian canggihnya mesin percetakan, juga perkembangan komputer yang seakan bagi beberapa orang kian sulit diikuti.

Burhan Nurgiyantoro (2005: 163) menengarai bahwa cerita tradisional tidak begitu jelas tahun kemunculan dan penciptaannya. Hal itu disebabkan pola pewarisan yang bertumpu kepada tradisi lisan sehingga cerita rakyat lebih banyak bertahan secara alamiah dan antargenerasi secara turun-temurun. Bila seorang anak dari keluarga yang tidak pernah memiliki tradisi

mendongeng atau tidak mendapatkannya dari guru di kelas, mungkin ia tidak bakal pernah mendengar cerita rakyat tersebut. Akan tetapi, saat ini banyak anak bisa mengakses cerita rakyat dari berbagai sumber, baik lisan maupun tertulis. Secara lisan mereka mendapatkannya dari dongeng dan mereka pun memiliki kesempatan untuk membacanya secara langsung melalui buku atau bacaan lain yang berkisah tentang cerita tradisional.

Sisi lain, isi bacaan dipengaruhi oleh wacana yang diusungnya. Karena sifatnya yang samar dan simbolik, ideologi yang dikandung di dalamnya pun sering kali disampaikan secara diskursif, yakni dikonfirmasi melalui teks dan wicara (lisan). Melalui teks yang tercantum dalam sebuah bacaan itulah ideologi dikandung: multikulturalisme, feminisme, sosialisme, kapitalisme, radikalisme, dan sebagainya berkembang biak melalui wacana yang disampaikan oleh pengarang dalam teks dan gambar dalam sebuah bacaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Baik data maupun hasil yang diperoleh oleh penelitian ini ialah data verbal berupa deskripsi tentang sesuatu (Bogdan dan Taylor, 1992: 21), yakni deskripsi wujud unsur multikulturalisme dalam cerita tradisional Yogyakarta, yang dapat dijadikan sumber inspirasi pendidikan multikultural. Untuk mendapatkan makna yang berupa deskripsi unsur multikultural dalam cerita tradisional Yogyakarta, dilakukan kegiatan analisis wacana terhadap teks-teks cerita tradisional yang bersangkutan. Untuk menemukan keterkaitan unsur multikultural dalam cerita tradisional dan pendidikan multikultural juga dilakukan analisis terhadap teks-teks terkait. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari populasi cerita tradisional yang diterbitkan dalam 10 judul buku tentang cerita tradisional; sebagian merupakan bunga rampai khusus cerita tradisional Yogyakarta, atau bunga rampai cerita tradisional Indonesia yang memuat cerita tradisional Yogyakarta. Kesepuluh judul buku tersebut ialah *Pelangi Nusantara* (Balai Penelitian Bahasa, 1994), *Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara* (Kidh Hidayat, 2002), *Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta* (Prabowo Danu Priyo, 2004), *Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta* (Proyek Penerbitan dan Pencatatan Budaya Daerah), *Cerita Rakyat dari Yogyakarta 2* (Bakdi Soemanto, 1995), *Cerita Rakyat dari Yogyakarta 1* (Bakdi Soemanto, 1992), *Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta* (Soepanto, 1977), *Bandung Bondowoso* (Anom Sosroharjo, 1980), *Ulasan Cerita Rakyat Jawa Tengah* (V. Sudiati & Sujiyati, 2002), dan *Timun Emas, Cerita dari Jawa* (Heny V. Tinneke, 2006).

Dari sepuluh buku tersebut ditemukan 88 cerita tradisional Yogyakarta yang merupakan populasi penelitian ini. Dari 88 cerita tradisional Yogyakarta yang terkumpul dalam 10 buku di atas, diambil sampel secara purposif. Fokus penelitian ini ialah unsur multikulturalisme dalam cerita tradisional Yogyakarta.

Penelitian ini juga memanfaatkan data-data yang bersifat sekunder meliputi buku, makalah, esai, dan lain-lain yang dianggap perlu dan relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pembacaan dan pencatatan. Cerita-cerita tradisional yang telah dipilih dijadikan sumber data dibaca dengan cermat untuk ditemukan adanya berbagai unsur multikultural yang terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis wacana terhadap teks cerita tradisional dan wacana terkait. Analisis wacana merupakan alat analisis yang banyak digunakan untuk mengkaji hubungan makna dalam bahasa dalam kaitannya dengan konstruksi sosial (Rogers, *et al.*, 2005). Analisis wacana memiliki beberapa piranti, seperti prinsip analogi, implikatur, praanggapan, inferensi, referensi, kohesi, koherensi, dan pengetahuan tentang dunia (Kartomiharjdo dalam Burhan Nurgiyantoro, 1998: 54). Dengan teknik pencatatan, peneliti mencatat kutipan-kutipan teks yang dinilai mengandung wacana multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Seterusnya mencatat deskripsi data dalam bentuk tabel data dengan menggunakan komputer. Instrumen penelitian ini ialah peneliti sendiri (*human instrument*). Untuk melancarkan penelitian digunakan kartu data guna mencatat seluruh data terkait dengan masalah yang diungkap. Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa data deskripsi verbal. Sesuai dengan sifatnya, analisis data dilakukan dengan cara deskripsi kualitatif melalui langkah perbandingan antar data, kategorisasi, penyajian data dengan cara tabulasi dan deskripsi verbal serta pembuatan inferensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ditemukan 60 cerita tradisional Yogyakarta yang mengandung unsur multikulturalisme. Unsur-unsur multikultural tersebut dianalisis dan ditemukan adanya sumbangan nilai-nilai tersebut bagi terwujudnya pendidikan multikultural. Beberapa unsur multikultural yang ditemukan dapat dideskripsikan dan dianalisis sebagai berikut.

1. Solidaritas dan Persaudaraan

Solidaritas sosial dan persaudaraan sosial merupakan hal yang penting dalam masyarakat multikultural. Terbangunnya solidaritas sosial dan persaudaraan dilandasi rasa saling memahami dan menahan diri bila terjadi persoalan. Bila diperhatikan, konflik umumnya meletus di antara orang atau kelompok sesama saudara. Sumber konflik itu berragam, seperti rebutan warisan, rebutan perhatian, pembagian harta yang tidak adil, kesalahpahaman memandang sebuah persoalan, dan seterusnya. Masyarakat masa lampau juga mengalami masalah konflik antar-saudara.

Cerita tersebut menunjukkan, bagaimana dua orang saudara kandung yang telah berjuang bersama, menyepakati perjanjian tertentu, namun pada akhirnya ada yang menjadi korban pembunuhan. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh ketidakjelasan “kode perjuangan”, saat mana salah satu dari kedua pihak memiliki persepsi yang berbeda dengan yang lain. Karena perbedaan persepsi tidak kunjung dapat diselesaikan, bahkan menimbulkan rasa saling curiga dan amarah, konflik meletuk tidak terhindarkan lagi. Akan tetapi, yang menarik dari cerita ini adalah bagaimana masyarakat masa lampau telah berusaha “bersikap terhadap” fenomena kekerasan di tengah kehidupan mereka. Nenek moyang kita adalah masyarakat yang menentang adanya kekerasan. Apapun alasannya, bahkan mungkin dapat dibenarkan oleh rasio. Akan tetapi, kekerasan bukanlah jalan utama dalam sebuah perjuangan hidup. Dalam cerita tradisional di atas masyarakat mengungkapkan bahwa “Subali bukan satria bijaksana dan suka bertindak membabi buta. Ini sangat berbahaya”.

2. Kesetaraan Jender

Masyarakat multikultural dapat terwujud dan mampu mengelola keragaman sebagai potensi kesejahteraan bersama bila masing-masing anggotanya sedia menghormati dan menghargai anggota lain. Keragaman adalah sebuah keniscayaan yang harus dirayakan dengan cara semua pihak berusaha mendorong terbangunnya tradisi hidup setara, termasuk setara dalam berbagi peran kehidupan berdasarkan jenis kelamin, fisik maupun sosial. Masih banyak orang yang kurang tidak sedia memahami persoalan ini, yakni membedakan mana peran jenis kelamin secara fisik dan secara sosial sehingga membangun stigma tertentu terhadap jenis kelamin tertentu. Misalnya, melalui proses stigmatisasi lewat struktur sosial-budaya, perempuan dikesankan seolah-olah hanya boleh memerankan peran-peran domestik seperti mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, dan sebagainya. Stigma semacam itu seakan-akan menegaskan jenis kelamin laki-laki sebagai pihak yang sebenarnya juga cocok melakukan pekerjaan tersebut. Atau, dengan kata lain, seakan-akan dikesankan bahwa hanya perempuan yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.

Stigma semacam itu memiliki implikasi serius karena beranggapan bahwa perempuan merupakan makhluk kelas dua dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebagai makhluk kelas dua, perempuan lantas boleh diperlakukan secara semena-mena. Dampak dari pandangan ini ialah munculnya berbagai kekerasan, secara fisik maupun nonfisik, secara halus maupun kasar. Struktur sosial bias gender ini tampaknya “telah menyejarah” sehingga dianggap sebagai sebuah fenomena yang lumrah, biasa, dan karenanya tidak menyimpan persoalan serius. Dalam kondisi semacam itu, lantas dikenalkan apa yang disebut sebagai feminisme.

Awalnya gerakan feminisme diperlukan saat masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pula dari masyarakat masa lampau Yogyakarta. Misalnya, penelitian ini menemukan ada sebuah cerita tradisional yang cukup populer, yakni tentang Roro Jonggrang dan seputar terjadinya Candi Prambanan.

Dalam cerita tersebut dapat diungkap adanya kandungan “feminisme Jawa” yakni semangat perlawanan perempuan yang berjiwa Jawa. Dalam dunia bathin Orang Jawa, pernyataan “mengiyakan” atau “menidakkan” sering kali diungkapkan dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya, ketika seseorang ditanya tentang persetujuan, dan ia hanya diam, maka ia dianggap setuju. Saat seorang perempuan mengatakan “ya” tetapi mencantumkan syarat-syarat yang mustahil dicapai dengan cara rasional, boleh dikatakan ia sebenarnya telah mengatakan “tidak”. Dalam kasus Roro Jonggrang sebenarnya dapat dinyatakan bahwa ia melawan apa yang diinginkan Bondowoso. Hal itu disebabkan oleh ulah Bondowoso sendiri, yakni telah membunuh Raja Boko yang merupakan ayah Jonggrang.

Jonggrang tentu saja tidak menolak secara vulgar dengan melihat kekurangan dan kelebihan-nya bila berhadapan secara fisik melawan Bondowoso yang dikenal sakti mandraguna. Yang dibutuhkan Jonggrang ialah siasat agar ia “tidak kalah telak”, atau “kalah terlalu mudah”,

bahkan bila mungkin “mengadali” Bondowoso dengan cara tertentu. Hal itu ditunjukkannya dengan menciptakan syarat-syarat yang mustahil. Selanjutnya, ketika syarat-syarat yang mustahil itu hampir tergapai, ia membuat siasat lain, yakni menciptakan “serangan fajar” yang membuat jin bala tentara Bondowoso *kocar-kacir* melarikan diri gara-gara menyangka pagi telah tiba.

Betapa persoalan ini sebenarnya telah dianggap serius dan menyita perhatian banyak anggota masyarakat masa lampau dapat dilihat dari popularitas cerita tradisional ini di kalangan masyarakat. Cerita tentang Roro Jonggrang ini bahkan dapat ditemukan dengan beberapa versi, misalnya soal nama, ada yang menyebut Roro Jonggrang dan Loro Jonggrang. Atau, ada yang bercerita secara lengkap mulai dari asal-usul Bandung Bondowoso hingga terjadinya tragedi cintanya dengan Roro Jonggrang.

Beberapa buku yang ditemukan melalui penelitian ini juga mengungkapkan cerita tradisional ini cukup populer di kalangan masyarakat sehingga dicantumkan sebagai bagian dari kumpulan cerita tradisional Yogyakarta, termasuk dalam cerita tradisional Indonesia.

Contoh lain fenomena feminisme Jawa ditunjukkan lewat cerita tradisional “Kiwil Iwel-iwel”. Hal menarik dari cerita tradisional ini perjuangan perempuan janda yang mengasuh seorang anak “difabel”.

Melihat posisinya, tokoh perempuan dalam cerita ini adalah sosok orang tua tunggal, *single parent*. Perempuan *single parent* boleh jadi karena cerai atau suami meninggal. *Menjadi single parent tidaklah mudah. Banyak hal yang berubah dan perlu penyesuaian diri. Banyak pula masalah yang muncul seiring dengan perjalanan menjadi seorang single parent. Selain persoalan beban produksi ekonomi, juga terkait tantangan politik dan sosial-budaya. Misalnya, seorang perempuan janda sering kali mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari lelaki hidung belang di sekitarnya* (<http://www2.kompas.com/kesehatan/news/0510/14/100133.htm>).

Selain itu, fenomena orang tua tunggal merupakan salah satu implikasi dari pandangan bahwa tanggung jawab ekonomi dan pendidikan anak tidak melulu dipikul oleh salah satu pihak orang tua, tetapi bisa diperankan oleh keduanya, bapak dan ibu. Dengan pandangan seperti itu, proses pemisahan kedua orang tua dianggap tidak menjadi persoalan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari dan kasih sayang. Karena itu, pandangan bahwa perempuan yang sering dituduh sebagai makhluk lemah, tidak berdaya tanpa kehadiran suaminya, menjadi kurang dapat dibenarkan. Apalagi, dalam cerita ini ditunjukkan bahwa sang ibu mengasuh seorang anak “difabel” alias dianggap “aneh” di tengah masyarakatnya. Kuasa seorang perempuan janda yang tetap mengasuh seorang anak *difabel* di tengah masyarakat yang masih bias *difabel* merupakan fenomena menarik betapa perjuangannya memerlukan kesabaran dan keteguhan yang besar. Masalah yang didapatnya bukan semata karena ia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, tetapi juga status janda dan posisi anaknya yang seorang *difabel*.

Struktur sosial-budaya yang diskriminatif, yang memiliki kecenderungan meminggirkan dan menomorduakan manusia lain sebagai makhluk lemah, tidak berdaya, rendah, juga bisa ditunjukkan melalui perilaku tidak ramah *difabel*. *Difabel* ialah terminologi “kritis” untuk menyebut kaum yang mengalami persoalan fisik, tetapi mereka tetap makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan tertentu. Di masa lalu, menurut pandangan umum, kaum seperti itu disebut sebagai kaum cacat, *disabled*, yang tidak memiliki kemampuan. Pandangan dan terminologi semacam itu sepertinya tidak mengandung persoalan, tetapi, penggunaan istilah untuk

menyebut posisi kaum tertentu juga bisa dianggap sebagai sebetulnya kekerasan terselubung, menyejarah, dan mempengaruhi cara berpikir orang banyak. Karena dianggap biasa, penyebutan “orang buta mata buta hati”, “tuli telinga dan hatinya”, dan sebagainya dianggap sebagai perumpamaan yang lumrah.

Kaum *difable*, seperti juga masyarakat umum, memiliki keterbatasan dan kelebihan. Mereka juga dapat berkarya, memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya, dan memberikan sumbangsih tertentu bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat masa lampau negeri ini juga mengalami persoalan serupa terkait posisi *difable* di tengah masyarakat. Akan tetapi, mereka dapat disadarkan, bahwa meremehkan orang lain dengan cara pandang tertentu adalah kesalahan besar.

Difable merupakan kelompok yang rentan dan termarginalkan dalam masyarakat, bahkan sering kali dianggap sebagai kelompok yang “menyusahkan” masyarakat. Hal itu semakin diperparah oleh kondisi yang kurang mengakomodir, bahkan tidak digubris oleh para pengambil kebijakan. Misalnya, kondisi semacam itu dapat tercermin dari arah dan sasaran pembangunan yang mengesampingkan kebutuhan kelompok rentan ini (<http://pojokmagelang.co.cc/?p=56>).

3. Perdagangan Terbuka

Kehidupan masyarakat multikultural tidak dapat dilepaskan dari unsur ekonomi, khususnya tradisi berdagang. Di tengah keragaman masyarakat, mereka yang terlibat dalam kegiatan jual-beli juga dituntut untuk menghormati dan menghargai keragaman itu. Penghormatan dan penghargaan itu diberikan pada hal-hal yang bersifat fisik dan nonfisik, misalnya, bagaimana antara pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pembeli yang berbeda latarbelakang budaya. Agar proses transaksi jual-beli dapat sukses, masing-masing anggota masyarakat multikultural dituntut untuk menanggalkan egoisme yang bersifat sektarian, rasis, dan semacamnya. Sebaliknya, justru mereka harus belajar untuk mengedapankan sikap hidup memahami yang lain sehingga keragaman dapat dirayakan, tidak dinegasikan menjadi seragam.

Kesadaran semacam itu penting untuk diajukan di tengah merebaknya berbagai forum saudagar berlatarbelakang daerah. Suhartono (2007) misalnya, menengarai fenomena menjamurnya berbagai forum pertemuan saudagar berlatar belakang kedaerahan layak untuk dikritisi. Hal itu terkait dengan perlunya membangun kesadaran kebangsaan di tengah perjalanan bangsa Indonesia yang sedang terpuruk seperti sekarang. (<http://www2.kompas.com/kesehatan/news/0510/14/100133.htm>).

Kiranya nenek moyang di masa lalu pun menghadapi realitas multikultural di dunia dagang. Akan tetapi, mereka telah berhasil menciptakan sebuah ruang bersama, *public sphere*, ruang mana mereka dapat saling bertegursapa dan belajar saling memahami. Yang mempertemukan mereka dalam ruang imajinasi adalah keberhasilan berjual-beli, perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama pedagang, atau sesama pembeli, dan sesama anggota masyarakat. Karena itu, tidaklah mengherankan bila mereka memiliki semangat tinggi dalam mendorong kemajuan dunia perdagangan tanpa *diembel-embeli* sentimen ras, semangat sektarian antarkelompok dan seterusnya. Cerita tradisional berjudul “Sumur Berkah Nogotirto” berikut ini memberikan gambaran menarik, bagaimana proses bermasyarakat multikultural di dunia perdagangan dapat berjalan dengan indah.

4. Nilai Kekeluargaan

Sebuah kata hikmah menyatakan, pendidikan terbaik di mulai dari keluarga. Keluarga adalah fondasi pertama bagaimana nilai-nilai tertentu ditanamkan dan ditumbuhkan sehingga membentuk karakter seseorang di masa dewasa. Masyarakat multikultural juga dibentuk oleh keluarga-keluarga yang seharusnya memiliki wawasan multikultural. Dalam keluarga itu sendiri juga tidak akan luput dari beragam persoalan, kepentingan, dan semacamnya meskipun anggota-anggotanya masih memiliki ikatan darah. Perbedaan kepentingan ekonomi dan politik misalnya, bila tidak berhasil dinegosiasikan dan menemukan kesepakatan-kesepakatan tertentu dapat mengancam keutuhan sebuah keluarga.

Nenek moyang negeri ini, khususnya di Yogyakarta, memiliki pengalaman dan pengetahuan tertentu tentang persoalan keluarga di tengah kehidupan masyarakat multikultural. Contoh masalah nyata yang dihadapi banyak anggota masyarakat adalah cara-cara mengambil jalan pintas dalam mengambil keputusan tertentu, tanpa berpikir dampak serius yang mengiringinya. Sikap tergesa-gesa dan tanpa perhitungan sering menjadi sumber konflik, yang tidak hanya memberi dampak negatif kepada masyarakat, tetapi juga kepada keluarga itu sendiri. Sebuah cerita tradisional yang cukup populer berjudul "Timun Mas" barangkali menjadi kasus menarik bagaimana sikap dan perilaku tanpa perhitungan itu menjadi persoalan krusial bagi masyarakat manapun, termasuk masyarakat multikultural itu sendiri.

Salah satu kebahagiaan yang didapatkan sepasang suami-istri bersumber dari hadirnya sang buah hati, keturunan yang akan meneruskan nilai-nilai yang diwariskan orang tuanya. Ketika sang buah hati yang dinanti tidak hadir juga, bahkan dalam waktu lama, maka hati orang tua pun gundah-gulana. Segala cara ditempuh seperti konsultasi medis maupun nonmedis. Akan tetapi, kepanikan menghadapi masalah seringkali membuat seseorang mengambil keputusan yang tidak tepat. Keputusan itu bukan saja tidak berhasil menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Kepanikan-kepanikan itu sering muncul di tengah anggota masyarakat dengan sebab beragam dan menjadi sumber konflik, termasuk konflik dalam rumah tangga.

Kasus yang terjadi dalam cerita tradisional tersebut mirip dengan apa yang saat ini sering disebut sebagai *trafficking*, yakni tindakan kriminal jual-beli manusia dengan berbagai alasan. Umumnya korban dari merebaknya kriminalitas *trafficking* ini ialah anak-anak dan perempuan. Ada di antara mereka yang diculik, lantas dijual ke luar negeri sebagai budak seks. Kiranya, apa yang dialami oleh Timun Mas ialah bentuk lain dari *trafficking* itu tanpa disadari. Membuat perjanjian tertentu dengan mengorbankan anak-anak, dengan mendapatkan imbalan tertentu boleh disebut sebagai *trafficking*. Contoh nyata dari kriminalitas ini ialah membayar utang orang tua dengan mengorbankan anak gadis sebagai imbalannya, kalah judi dengan mengorbankan anak, dan seterusnya.

Sebagaimana dijelaskan LBH APIK terkait Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang merupakan bentuk modern perbudakan manusia. Hal itu juga menjadi satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Semakin marak perdagangan orang, termasuk Indonesia dan negara berkembang lain, menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lebih lanjut menurut LBH APIK, bukti empiris menunjukkan perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan dengan tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lain, juga eksploitasi lain semacam kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak semakin meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir maupun tidak. Bahkan, kegiatan pidana itu melibatkan perorangan, juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Jaringan mereka menjangkau antarwilayah dalam negeri dan antarnegara (<http://www.lbh-apik.or.id/uu%20ptppo%20-%20penjelasan.htm>.)

Merebaknya *trafficking* di negeri ini boleh disebut sebagai tragedi yang menimbulkan kecemasan-kecemasan tertentu, mengingat kemuncul “buto ijo-buto ijo” di jaman sekarang dilengkapi dengan kekuatan modal dan kekuasaan. Untuk mengatasi masalah sosial semacam ini tidak ada jalan lain kecuali menanamkan semangat perlawanan dari semua pihak, termasuk korban-korban *trafficking*. Kisah tradisional Timus Mas memberi contoh menarik, bagaimana siasat-siasat perlawanan harus dijalankan, sekecil apapun bentuknya sehingga perjuangan melawan *trafficking* tidak boleh dihentikan meski sejengkal.

5. Penghormatan terhadap Tata Susila

Unsur multikulturalisme lain yang dapat ditemukan dalam cerita tradisional ialah perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai atau tata susila yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Contohnya ialah seorang tamu hendaknya tidak melupakan kewajibannya untuk meminta ijin, *kulo nuwun*, kepada masyarakat setempat khususnya perangkat kampung atau desa. Hal ini tidak saja untuk menjaga sopan-santun bermasyarakat, atau berwarganegara, tetapi juga untuk menjaga kerukunan hidup bersama masyarakat, meminimalisir kemungkinan muncul konflik akibat kesalahpahaman antara pendatang dan penduduk setempat.

Meskipun disusun oleh masyarakat, sanksinya dianggap “ringan”, dan seterusnya, tetapi sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap para pelanggar norma sosial ini seringkali berjalan lebih efektif. Misalnya, seorang pendatang baru yang tidak segera lapor perangkat desa, tidak mengenalkan diri kepada tetangga, mungkin akan menghadapi pengucilan diam-diam yang dilakukan oleh para tetangganya. Ketika diadakan acara oleh kampungnya, mungkin pendatang baru tersebut tidak dilibatkan, bahkan tidak mendapatkan undangan untuk mengahadirinya. Itulah sanksi sosial yang diharapkan dapat menyadarkan pendatang baru tersebut.

6. Merasa Cukup dalam Hidup

Cerita tradisional Yogyakarta juga mengandung unsur multikultural berupa kecenderungan sebagian masyarakat untuk bersikap dan berperilaku tamak, serakah, dan ingin meraih

enak tanpa usaha keras. Misalnya, unsur multikultural seperti itu dapat ditemukan dalam cerita berjudul “Mbok Randa Bintara dan Lurah Cakrajaya”.

Sikap hidup tamak menjadi salah satu sumber merebaknya konflik di masyarakat, baik konflik berlatarbelakang politik, ekonomi maupun budaya. Misalnya, keserakahan di bidang ekonomi dapat memicu terjadinya kesenjangan ekonomi; masyarakat yang merasa dipinggirkan oleh perilaku serakah dari masyarakat lain, dan tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan, sedikit penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan seterusnya, dapat berperilaku anarkhis. Begitu pun sikap serakah di bidang politik; dapat menjadi sumber konflik karena perebutan kekuasaan seringkali diiringi perilaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk mengada-adakan isu dan mengadu-adu masyarakat bawah untuk saling bertarung. Di sinilah pentingnya sikap merasa cukup atas apa yang sudah diberikan Tuhan.

7. *Sharing* dan Kontrol Kekuasaan

Cerita tradisional Yogyakarta dapat menunjukkan betapa akrabnya masyarakat dengan cerita-cerita yang terkait dengan kehidupan politik, termasuk peristiwa politik terkait kekuasaan keraton sebagai simbol penguasa di masa lampau. Misalnya, peristiwa politik dapat ditemukan pada cerita tradisional berjudul “Legenda Badhung Gatutkaca” tentang perebutan kekuasaan dengan mengambil kehidupan dunia politik perwayangan. Cerita ini sangat pekat dengan kandungan narasi rebutan kekuasaan.

Wacana tentang rebutan kekuasaan seperti dikutip di atas memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya masyarakat masa lampau negeri ini, khususnya di Yogyakarta juga akrab dengan dialektika wacana politik kekuasaan. Masyarakat memiliki cara sendiri, yakni melalui tradisi lisan ke lisan, baik dengan cara meminjam dunia lain semisal pewayangan maupun mengaitkan secara langsung wacana politik tersebut dengan kekuasaan politik saat itu, yakni keraton. Contohnya dapat ditemukan dalam cerita seputar peristiwa konflik antara putra keraton dengan ayahnya, raja keraton. Meskipun keraton merupakan tempat yang tidak mudah dijangkau oleh masyarakat awam, tetapi mereka memiliki cara sendiri untuk membaca dan memahamipersoalan yang sedang terjadi di dalam keraton. Masyarakat seakan-akan berpandangan bahwa apa yang terjadi di dalam keraton pasti dapat berpengaruh dengan kehidupan mereka yang berada di luar keraton.

Konflik dalam keraton umumnya terkait dengan suksesi kepemimpinan politik. Misalnya, kontroversi kembali terjadi di masa sekarang terkait siapakah kelak yang menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X meninggal dunia atau oleh sebab lain’. Mengingat saat ini Sri Sultan HB X hanya memiliki anak perempuan. Ada yang mewacanakan GKR Pembayun yang kelak menggantikan ayahnya, sebagaimana anak perempuan raja di Inggris dan Belanda. Akan tetapi, kontruksi sosial-budaya Yogyakarta dianggap akan menjadi salah satu sumber halangan naiknya Pembayun menjadi Ratu.

Moedjanto (2002), seorang sejarawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menyatakan bahwa mungkin saja GKR Pembayun kelak dapat menggantikan HB X untuk menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta. Hal itu bisa terjadi karena pengaruh wacana kesetaraan gender sehingga akan terjadi seperti di Kerajaan Inggris dan Belanda yang anak perempuan bisa menjadi raja. Moedjanto menambahkan, berdirinya Mataram selalu diwarnai konflik intern. Di samping itu, setiap ada raja baru, para bupati selalu coba melawan pemerintah pusat.

Karena itu, menurut Moedjnato, supaya Mataram tetap eksis perlu dipilih raja dari kalangan laki-laki. Jika perempuan, ketika itu dikhawatirkan tidak bisa menangani konflik dengan para bupati yang cenderung menggunakan kekerasan (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0205/29/sh05.html>).

Fenomena lain yang terkait dengan proses konflik kekuasaan kraton ialah sosok Ratu Laut Selatan. Cerita tentang Ratu Laut Selatan cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan kekuasaannya di laut selatan, khususnya pantai Parangtritis yang sering menelan korban. Selain itu, Ratu Laut Selatan sering dikait-kaitkan dengan raja keraton Yogyakarta. Konon Sang Ratu memiliki hubungan istimewa dengan raja keraton sebagai bagian dari ikhtiar spiritual Sultan Ngayogyakarta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayahnya. Akan tetapi, siapa sebenarnya Ratu Laut Selatan memang masih menimbulkan perdebatan. Namun demikian, apapun versi asal-usulnya, masyarakat dengan tradisi lisannya memiliki cara sendiri untuk merakit cerita terkait keberadaan sosok tersebut.

Berkaitan dengan cerita tentang Ratu Laut Selatan, K.R.T. Hardjonagoro, ahli sejarah yang dekat dengan Keraton Solo menilai bahwa kekuatan kisah Nyai Roro Kidul itu tidak dapat dilepaskan dari paduan kekuatan alam, misteri alam yang transendental, dan citra politik. Citra politik muncul seiring dengan berkembangnya kisah tersebut. Menurutnya, Panembahan Senapati dan raja-raja keturunannya memperoleh citra sebagai raja sakti (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/09/17/SEL/mbm.19880917.SEL28197.id.html>).

Selain itu, dalam disertasi Soemardjan berjudul *Social Changes in Jogjakarta*, diterbitkan *Cornell University Press*, disebutkan juga adanya peranan Nyai Roro Kidul. Menurut Selo, salah satu hal yang menyebabkan kekuasaan Sultan atas rakyat tidak tergoyahkan adalah karena Sultan dipandang memiliki kesanggupan berhubungan langsung dengan nenek moyang, Nyai Roro Kidul, Ratu perkasa dari Lautan Hindia. Dalam konteks demikian, siapakah yang tidak menaruh hormat, segan, dan takut kepada seorang raja yang mempunyai istri makhluk halus yang cantik dan sakti? Nyai Roro Kidul terbukti merupakan penegak kekuasaan yang ampuh. Legenda Nyai Roro Kidul mengalir terus. Bahkan, tidak kurang terdapat tradisi yang turut melestarikan legenda tersebut. Misalnya, bangunan panggung Songgo Buwana di Kasunanan Solo. Konon tidak setiap orang bisa menaikinya. Bangunan dengan pucuk khas bagai tutup sesaji, di loteng paling atas disediakan kamar khusus bagi Nyai Roro Kidul. Syahdan, setiap malam Jumat atau malam Selasa Kliwon Nyai Roro Kidul hadir di situ. Berbagai sesaji plus pakaian lengkap untuk Nyai Roro Kidul disediakan. Alkisah, Nyai Roro Kidul pernah murka di tahun 1954, gara-gara sesaji lupa disediakan. Songgo Buwana diamuk api, dan anehnya seperangkat pakaian Nyai Roro Kidul utuh tidak terusik ganasnya api (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/09/17/SEL/mbm.19880917.SEL28197.id.html>.)

Terlepas dari cerita di atas, beragam versi cerita tentang legenda Ratu laut selatan tersebut menggambarkan bagaimana wacana kekuasaan politik berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang dialektis. Dalam pandangan masyarakat kekuasaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan Tuhan kepada sosok yang dianggap mampu mengembannya, yakni raja. Tujuan dari kekuasaan itu sendiri adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat baik lahir maupun batin. Dengan pandangan seperti, kekuasaan bukanlah sesuatu yang perlu diperebutkan karena dianggap sebagai sebuah tanggungjawab yang mahaberat. Bila memang masyarakat dan Tuhan berkehendak, seeseorang yang memang berhak men-

dapatkan kekuasaan itu pastilah ia akan mendapatkannya. Bahkan, mungkin yang bersangkutan akan dianugerahi kekuasaan yang lebih besar, indah, dan berwibawa dari kekuasaan di dunia manusia, yakni “di dunia sana”.

Kandungan unsur multikulturalisme bidang politik juga dapat ditemukan pada cerita tradisional tentang asal-usul terbentuknya Kesultanan Yogyakarta. Cerita ini barangkali cukup relevan dibaca dan dipahami kembali dalam konteks perkembangan situasi nasional terkait posisi Kesultanan Yogyakarta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam cerita tradisional berjudul “Asal-usul Yogyakarta” tersebut terdapat wacana yang dapat menggambarkan bahwa persoalan lokal, regional, dan nasional tidak mungkin dilepaskan begitu saja dari konteks internasional yang sedang terjadi. Dari cerita tradisional dapat dipahami bahwa sejak dulu penguasa negeri ini tampaknya mengalami kesulitan untuk melepaskan intervensi politik dari bangsa lain.

Langkah yang diambil untuk menanggapi persoalan intervensi politik adalah dengan bersikap tegas, menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa merdeka. Intervensi adalah sebetulnya penjajahan politik. Karena itu, harus dilawan dengan segala daya. Mangkubumi sebagai seorang tokoh politik penting di masa itu memilih mengobarkan api perlawanan terhadap penjajah, termasuk kepada kesultanan yang dipimpin sendiri oleh bapaknya. Semangat perjuangan yang menggelora itu pun berakhir dengan berdirinya sebuah kepemimpinan baru, yakni Kesultanan Yogyakarta setelah melalui proses negosiasi politik. Cerita tradisional yang lain juga menarasikan bagaimana sebuah penjajahan, intervensi politik, bahkan ekspansi militer, harus dihadapi dengan gagah berani. Misalnya pada cerita “Asal-usul Nama Yogyakarta” dan “Pertempuran di Prambanan dan Letusan Gunung Merapi” berikut ini.

Namun demikian, konflik-konflik politik memang tidak selalu harus diselesaikan melalui cara-cara perlawanan militer, perjuangan bersenjata, perang gerilya, dan semacamnya. Ada saatnya bila memang sebuah konflik politik dapat diselesaikan melalui proses negosiasi, maka dapat ditempuh cara semacam itu sehingga tercipta rekonsiliasi politik. Proses rekonsiliasi politik harus terus diupayakan sebagai bagian dari usaha menciptakan masyarakat multicultural yang dinamis. Benih-benih dendam hendaknya dapat disingkirkan ketika proses negosiasi telah berjalan dan rekonsiliasi politik yang menguntungkan semua pihak telah dicapai. Hal itu bila dipahami bahwa kekuasaan politik hanyalah jalan untuk memakmurkan dan menyejahterakan anggota-anggotanya, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Selain itu, telah dijadikan doktrin bahwa berpolitik adalah seni bersahabat, yakni “musuh satu terlalu banyak dan seribu kawan masih kurang”. Cerita berjudul “Ki Pemanahan” dan “Desa Itu Bernama Butuh” berikut barangkali menjadi cermin menarik bagaimana sikap *legowo* dalam kehidupan politik harus diterapkan. Jeffrey Geovani menegaskan, tanpa rekonsiliasi politik proses kontroversi dan pertikaian politik tidak akan kunjung selesai. (<http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080113120/Tanpa-Rekonsiliasi-Pertikaian-Politik-Tak-Selesai.html>).

Bagi masyarakat multikultural yang memiliki potensi konflik beragam dibutuhkan kepemimpinan politik yang tegas, tidak pilih kasih, tebang pilih, dan mengedepankan aturan main yang berlaku, atau penegakan hukum yang berdaulat. Berbagai sumber konflik yang mengancam negara, menyebabkan kerusuhan sosial, keresahan masyarakat, sering kali juga dipicu oleh anggota-anggota keluarga istana, keluarga sang pemimpin yang memiliki beragam kepentingan, seperti kepentingan ekonomi maupun politik. Seorang pemimpin hendaknya mengedepankan

sikap negarawan dalam menyelesaikan, yakni bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar aturan hukum, termasuk anggota keluarganya. Cerita tradisional berjudul “Raden Rangga” berikut memberi wacana yang jelas bagaimana nenek moyang masa lalu berperilaku multi-kultural di bidang politik dan hukum.

Cerita tradisional di atas menegaskan bagaimana sebuah kepemimpinan politik seharusnya dijalankan oleh sosok pemimpin yang memiliki karakter negarawan. Akbar Tanjung menjelaskan, sebuah kepemimpinan politik yang negarawan sangat terkait komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Dengan sikap negarawan seorang pemimpin dituntut meminimalisasi kepentingan pribadi dan kelompok, sebaliknya memaksimalkan kepentingan bangsa dan rakyat yang lebih besar. Negarawan ialah mereka yang berjasa dan berani berkorban demi bangsa dan negara, apapun latar belakang politiknya. Dengan demikian, seorang pemimpin politik harus berani menanggalkan latar belakang kepentingan politiknya, untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan bangsa (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=728&Itemid=135).

Selain sosok pemimpin negarawan, kepemimpinan politik bagi masyarakat multikultural sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini karena sistem yang baik, pemimpin yang baik, menjadi kurang berjalan baik bila tidak diikuti dengan para pengikut, masyarakat yang baik, anggota-anggota yang baik. Dalam penjelasan Domingus Oktavianus Tobi, demokrasi tidak sekadar keyakinan yang berbuah kesepakatan untuk membagi kekuasaan, tetapi harus memberikan hak kepada individu warga negara untuk ikut serta menentukan masa depan bangsa dan nasibnya sendiri. Figur politik hendaknya menjadi pemimpin rakyat untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Dengan kata lain, upaya memajukan sebuah bangsa yang multikultural hendaknya didukung semua pihak yang tergabung di dalamnya, tidak menegasikan satu sama lain.

SIMPULAN

Cerita tradisional Yogyakarta mengandung unsur multikulturalisme, seperti solidaritas sosial dan persaudaraan, kesetaraan jender, ramah difabel, perdagangan terbuka, penghormatan tata susila, sikap hidup merasa cukup, serta *sharing* dan kontrol kekuasaan. Multikulturalisme yang ditemukan dalam cerita tradisional dapat menunjukkan cerita tradisional Yogyakarta sebenarnya intensif dalam pergulatan sosial-budaya kehidupan masyarakat. Kebudayaan sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikawal sehingga lebih memberi makna bagi terciptanya masyarakat yang berbudaya, kreatif dan mampu membangun kemandirian. Hal itu penting bagi perkembangan sebuah bangsa yang sedang berjuang menemukan jati diri di tengah kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert and Taylor, Steven J. 1992. *Introductions to Qualitative Research: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Arief Furchan. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- “Duh, Susahnya Jadi Single Parent”. diakses 01 Desember 2008. <http://www2.kompas.com/kesehatan/news/0510/14/100133.htm>
- “Feminisme”, diakses 01 Desember 2008. <http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>.
- Huck, Charlotte S., Hepler, Susan, and Hickman, Janet. 1987. *Children’s Literature in The Elementary School*. New York: Holt Rinehart and Hinston, Inc
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Lkis.
- Lukens, Rebecca J. 2003. *A Critical Hand Book of Children’s Literature*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2005. *Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- “Pembangunan Masih Kesempingan Diffable”. diakses 01 Desember. <http://pojokmagelang.co.cc/?p=56>
- Rogers, Rebecca, Berkes, Elizabeth Malancharuvil, Hui Diane, *et al.* 2000. “Critical Discourse Analisis in Education: A Review of the Literature”. *Review of Educational Research*. Fall 2005, volume 75, Number 3, page 365-367
- “Roro Kidul Alat Penegak Kekuasaan”. diakses 02 Desember 2008. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/09/17/SEL/mbm.19880917.SEL28197.id.html>
- Suhartono. 2008. “Kebangsaan atau Cuma Semangat Kedaerahan?”. diakses 01 Desember 2008. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0710/27/Politikhukum/3945079.htm>
- “Suksesi Keraton Yogyakarta: Bisakah GKR Pembayun Menggantikan Kedudukan Sultan HB X?” diakses 02 Desember 2008. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0205/29/sh05.html>.
- Tanjung. Akbar. 2008. „Kepemimpinan Politik yang Negarawan”. diakses 03 Desember 2008. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=728&Itemid=135

“Tanpa Rekonsiliasi, Pertikaian Politik Tak Selesai”. Diakses 03 Desember 2008. <http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080113120/Tanpa-Rekonsiliasi-Pertikaian-Politik-Tak-Selesai.html>

Teeuw. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.